

Pendidikan Politik Sebagai Wujud Peningkatan Partisipasi dan Kesadaran Kaum Milenial dalam Pemilu Serentak 2024

Author:

Adena Nurashiah Siregar¹
Khairunnisa Rizka²
Sartika Eka Fitri Lubis³
Reh Bungana Br. Perangin-
Angin⁴

Affiliation:

Universitas Negeri Medan

Corresponding email

adenasrg1999@gmail.com¹
khairunnisarizka99@gmail.com²
sartikaefl2@gmail.com³
rehbungana@unimed.ac.id⁴

Histori Naskah:

Submit:10-11-2023
Accepted:14-11-2023
Published:14-11-2023

How To cite:



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:

Latar belakang: Salah satu kelompok pemilih dalam pemilu adalah kaum milenial, selaras data dari KPU memaparkan kebanyakan pemilih dalam pemilu serentak 2024 adalah kaum milenial dengan capaian 35,75% dari DPT nasional atau sekitar 86.822.389 juta dari 219.807.222 juta pemilih membuat sara mereka sangat dibutuhkan dan berpengaruh sangat signifikan akan hasil pemilu. Pengetahuan dan pemahaman politik merupakan bagan krusial bagi generasi milenial guna memahami hak dan kewajiban mereka dalam pemilu serentak 2024 bagi bangsa dan negara serta menambah wawasan dan kesadaran mereka akan menyongsong serta memakai hak pilih dalam pemilu serentak 2024. **Metode penelitian:** Kajian merupakan kajian kualitatif dengan memakai studi kepustakaan dan lapangan yang dilaksanakan di SMA Swasta Cahaya Medan dengan memakai metode studi lapangan atau pelaksanaan berupa penyuluhan/sosialisasi berwujud edukasi dalam diskusi. **Hasil penelitian:** masih banyak pemilih milenial yang belum begitu paham akan partisipasi dalam politik serta belum begitu mengetahui akan proses pemilu serentak 2024. Namun dengan dilakukannya pendidikan politik bisa membantu siswa dalam memahami akan krusialnya hak mereka dalam menyongsong dan menyukseskan pemilu serentak 2024. Tampak bahwa siswa begitu semangat dan berantusias dalam mendengarkan mengenai pemilu serentak 2024 ini sehingga tingkat kesadaran dan partisipasi politiknya siswa juga meningkat. **Kesimpulan:** Hasil dari kajian ini sangat bermanfaat bagi kaum milenial dalam menyongsong dan menyukseskan pemilu serentak 2024 dan turut andil dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan pemilu serentak 2024 yang akan datang agar tidak termasuk dalam golput.

Kata kunci: kaum milenial, partisipasi, pemilu serentak.

Pendahuluan

Pemilu dikatakan sebagai perwujudan sistem demokrasi yang melayani dan menyatukan suara rakyat sebagai pemimpin dalam memilih siapa yang akan menjadi pemimpinnya. Partisipasi dalam politik menjadi tolak ukur keberhasilan sistem demokrasi dan pemilu merupakan upaya dalam menentukan siapa yang akan memerintah (Rahman, 2020). Sehingga partisipasi pemilu merupakan wujud dari menyongsong demokrasi yang akan mempengaruhi siapa yang memenangkan pemilu dan menguasai hajat hidup orang banyak. Salah satu kelompok pemilih dalam pemilu adalah generasi milenial. Generasi milenial dikatakan sebagai sekelompok generasi muda yang lahir antara awal tahun 1980an dan awal tahun 2000an (Zulkarnaen, 2020). Di banyak negara, partisipasi politik tercatat generasi milenial melihatnya seperti orang dewasa partisipasinya sangat tinggi dan mampu menyukseskan pemilu. Faktor yang menyebabkan generasi

milennial golput pada saat pemilu (Kadir, 2022). Pertama ada anggapan bahwa terbiasa dengan dunia digital membuat tidak peduli akan politik. Kedua kurangnya informasi waktu pencoblosan. Ketiga ketidakpedulian generasi milenial terhadap politik, keempat dengan adanya kaum milenial menjadi bukti bahwa partisipasi politik itu nyata dan perlu kajian mendalam. Pada tahun 2024 Indonesia kembali menyelenggarakan pemilu serentak yaitu dan akan memilih siapa saja yang akan menjadi pemimpin baik dalam tahta tertinggi ataupun di bawahnya. Selaras data KPU terkonfirmasi bahwasanya kaum milenial memiliki jumlah suara yang cukup banyak dalam menyongsong dan menyukseskan pemilu serentak 2024 dengan capaian 35,75% dari DPT nasional atau sekitar 86.822.389 juta dari 219.807.222 juta pemilih pemilih membuat suara mereka sangat dibutuhkan dan berpengaruh sangat signifikan akan hasil pemilu. Pastinya sokongan dari kaum milenial ini akan memberikan hasil yang baik dan akurat sehingga untuk memperlancar itu diperlukannya pendidikan politik yang kuat kepada kaum milenial. Kesadaran akan politik bagi kaum milenial itu merupakan pondasi krusial sebab mereka harus tahu hak dan kewajiban mereka dalam menyongsong dan menyukseskan pemilu serentak 2024 bagi bangsa dan negara mereka. memaparkan pendidikan politik dikatakan sebagai wujud sadar akan pelaksanaan pemilu yaitu berupa pensosialisasian agar kaum milenial paham dan menghayati nilai yang ada pada sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Untuk memecahkan persoalan yang telah diuraikan diatas, maka perlu dilakukan adalah melakukan pendidikan politik yang bermaksud meningkatkan wawasan kaum milenial dalam memakai hak dan kewajibannya dalam menyukseskan dan menyongsong pemilu serentak 2024. Selain itu, kajian ini juga dapat diwujudkan dalam masyarakat mengenai pentingnya kesadaran politik dan partisipasi dalam menyongsong dan menyukseskan pemilu ditengah masyarakat luas.

Studi Literatur

Menurut persoalan pendidikan politik dan hubungan politik merupakan sesuatu yang dekat atau hampir dapat digunakan dan berhubungan dengan politik dalam artian dapat dianggap sebagai pendidikan politik (Akmaluddin, 2022). Selain itu, pendidikan politik biasanya disebut sebagai wujud perubahan sistem politik masyarakat agar mereka paham akan prinsip sistem politik hukum yang indah dan tersistem sebab berupaya membentuk masyarakat agar mampu menyelaraskan dengan etika/kebijakan dalam mewujudkan tujuan politik (Hasibuan, 2022). Sedangkan pendidikan politik sebagai upaya memperbaiki diri berupa pengetahuan politik masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi secara efektif yang selaras akan konsep demokrasi yang mampu memenuhi perannya melalui partisipasi dalam membantu warga negara guna memahami, mencintai dan merasakan serta mewujudkan hak dan kewajiban mereka (Zulfa, 2019). Di Indonesia, pendidikan politik bagi kaum milenial merupakan proses peningkatan kesadaran politik dan negara dalam mendukung Pancasila dan UUD 1945. memaparkan pendidikan politik memiliki maksud berupa mendorong perluasan visi, minat dan partisipasi, kajian mendalam mengenai filosofis politik, permasalahan sosial, ekonomi, demokrasi dan hukum serta menekankan nilai yang teruang dalam Pancasila dan UUD 1945 serta meningkatkan pemahaman mengenai fungsi utama institusi dalam nilai masyarakat yang memperjuangkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara (Polii, 2020).

Kesadaran politik merupakan pengetahuan yang krusial akan situasi politik yang mempengaruhi kepentingan dan keprihatinan masyarakat serta hak dan tanggung jawab sebagai warga negara (Pratama, 2023). Kesadaran politik dikatakan sebagai kesadaran warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebijakan sebagai penerimaan wewenang dan tanggung jawab sebagai warga negara (Niode, 2023). Kesadaran politik merupakan hal krusial dalam tingkat partisipasi politik yang memiliki koneksi langsung serta ide yang besar dan tingkat komunitas politik yang lebih tinggi. Selain itu, kesadaran politik warga negara menentukan partisipasi politik masyarakat maknanya berbeda pengetahuan dan kesadaran akan hak dan tanggung jawab terkait lingkungan dan kebijakan masyarakat yang terlibat dalam proses partisipasi politik (Yusrin, 2023). Terutama kesadaran politik yang dikolaborasikan dengan kepentingan dan keprihatinan masyarakat dalam mengeksploitasi kepentingan sosial dan politik. Demikian itu, dukungan penuh masyarakat itulah hal yang krusial dalam mengatasi permasalahan masyarakat. Sehingga kemunculannya mengenai kesadaran politik merupakan wujud hati nurani setiap orang yang punya hak dan kewajiban warga negara dalam lingkup politik, hak ekonomi, keamanan, kesehatan, pendidikan dan

pekerjaan. Jadi ketika Kesadaran politik ini harus ditautkan akan partisipasi mengenai pemerintahan, semakin besar pula kesadaran dan keterlibatan politiknya dan aktif.

Pemilihan umum dikatakan sebagai proses memilih orang untuk mengisi kursi pemerintah dan diselenggarakan untuk mewujudkan masyarakat demokratis dimana pemimpin dipilih selaras suara terbanyak. Melalui pemilihan rapat umum sebagai upaya paling populer untuk memilih anggota dewan, wakil rakyat, Presiden dan jajarannya yang dibuat secara langsung, umum, bebas, pribadi, jujur, dan adil dalam lingkungan NKRI selaras Pancasila dan UUD 1945 (Fauzi, 2023). Pemilihan umum itu merupakan hal krusial bagi negara demokrasi sebab dari pemilu rakyat bisa memakai kekuasaannya berupa suara untuk menyongsong dan menyukseskan pemilu. Sebagai pemegang kunci dalam penyelenggaraan pemilu, masyarakat memiliki kedaulatan penuh sehingga dalam pelaksanaannya harus melalui prinsip berupa langsung yang bermaksud rakyat punya hak untuk memilih secara langsung sesuai keinginannya tanpa ada tekanan, dilakukan tanpa mendiskriminasi agama, ras, suku, gender, kelas sosial, pekerjaan, regionalisme dan status sosial lainnya, gratis untuk semua warga negara yang mempunyai hak untuk memilih, rahasia dan dijamin privasinya, jujur dalam artian harus selaras akan hukum dan layak dalam memilih (Kadir, 2022).

Keterlibatan dalam politik, khususnya partisipasi dalam pemilu dikelompokkan dalam ilmu politik sebagai bagian dari penyelidikan tindakan politik (Averus, 2020). Demikian itu, partisipasi sangat bermanfaat dalam politik negara. Partisipasi warga negara biasa ataupun mereka yang tidak memiliki hak untuk memfasilitasi pengambilan keputusan dalam bentuk politik publik. memaparkan partisipasi dalam politik merupakan program untuk berpartisipasi dalam proses tersebut keputusan yang dibuat pemerintah. Demikian itu, sering kali diasumsikan bahwa masyarakat dapat dilibatkan akan lebih baik demi menyongsong keberhasilan politik itu sendiri. Dalam pelaksanaannya besar partisipasi menunjukkan warga negara tersebut ikut dan paham akan permasalahan tersebut politik dan ingin berpartisipasi dalam kegiatan ini. Partisipasi politik sebagai perilaku warga dalam turut serta pengambilan keputusan pemerintah yang sifatnya individual atau kolektif, terstruktur atau tidak terstruktur, sistematis atau damai, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif (Adam, 2023).

Generasi merupakan apa yang terjadi di masyarakat karena perbedaan usia atau tahun lahir satu kelompok orang mempunyai kelompok yang lain hal itu disebabkan fenomena sosial yang mana beberapa punya kesamaan seperti umur, pengalaman, dan cara berpikir (Akmaluddin, 2022). Selain itu, individu akan dikelompokkan ke dalam generasi yang sama jika memiliki tahun lahir yang sama. Untuk alasan ini melakukan perbedaan generasi tergantung jangkauan waktu tahun lahir diantaranya generasi *lost*, generasi *government issue*, generasi *silent*, generasi *boom*, generasi *X*, dan generasi *milenial*

Tabel 1.1 Pengelompokan Generasi dan Tahun Lahir (Fauzi, 2023)

No	Generasi	Tahun Lahir
1	<i>Lost</i>	1883 – 1900
2	<i>G.I</i>	1901 – 1924
3	<i>Silent</i>	1925 – 1942
4	<i>Boom</i>	1943 – 1960
5	<i>X</i>	1961 – 1981
6	Millennial	1982 – 2002

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dilakukan melalui observasi langsung dengan pengamatan mendalam selama pelaksanaan dengan data dikumpulkan melalui triangulasi data berupa observasi, wawancara kepada guru dan siswa yang bermaksud mendapatkan keakuratan data (Adlini, 2023). Kajian ini dilakukan di SMA Swasta Cahaya Medan dengan siswa yang memiliki umur minimal 17 tahun sebagai subyek kajian sebab siswa dengan usia segitu adalah kaum milenial.

Hasil

Sebelum penyampaian materi, siswa diberi soal terlebih dahulu yang berguna mengetahui pemahaman awal yang bertautan akan partisipasi dan kesadaran politik serta tahapan pemilu serentak 2024. Kegiatan dibuat dengan metode ceramah dan tanya jawab, sehingga terjadi interaksi antara pemberi materi dan siswa yang ikut kegiatan ini. Dari hasil diskusi dan tanya jawab mengenai partisipasi dan kesadaran politik tampak jawaban siswa sangat bervariasi dan ada yang tidak tahu mengenai hal tersebut, sehingga dengan adanya pelaksanaan ini akan membuat mereka semakin tahu mengenai partisipasi dan kesadaran politik yang akan berguna untuk menghadapi pemilu serentak 2024. Dari hasil tes tersebut dapat digambarkan bahwa pengetahuan siswa di SMA Swasta Cahaya Medan belum begitu memahami terkait partisipasi dan kesadaran politik serta pemilu serentak 2024. Maka pelaksanaan pendidikan politik ini sangat penting bagi mereka yang kemudian dilakukan penyuluhan kepada siswa SMA Swasta Cahaya Medan untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik.

Kesadaran pendidikan politik bagi generasi milenial, dalam hal ini siswa SMA Swasta Cahaya Medan, menjadi krusial sebab hal itu menunjukkan tingkat pelaksanaan pemilu dan dampaknya terhadap tingkat perilaku kaum milenial. Selain pemaparan mengenai tata cara dan program penyelenggaraan pemilu bagi pemilih dan meningkatkan wawasan akan kesadaran politik di kalangan kaum milenial. Memilih juga merupakan hak penting setiap warga negara demokrasi. Setelah sesi tanya jawab selesai, hasilnya memaparkan kesadaran dan kewaspadaan politik menghadapi pemilu serentak 2024 dari tes yang diberikan kepada siswa yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan kembali ke apa yang dijelaskan. Untuk hasil tes pasca-acara menunjukkan pembaruan dan perubahan dalam partisipasi dan kesadaran siswa akan krusialnya partisipasi politik pemilu serentak 2024. Pendidikan politik pada kaum milenial sangat berharga untuk mewujudkan partisipasi pemilih yang ikut serta dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam pemilu agar hal tersebut tidak terjadi termasuk absen. Agar hal ini terjadi, kesadaran sangatlah penting kaum milenial akan memahami pentingnya menggunakan suara dalam menyongsong dan menyukseskan pemilu serentak 2024 dengan jumlah yang besar. Dengan begitu kaum milenial dituntut untuk memiliki pemahaman dan pengetahuan penuh dalam partisipasi dan kesadaran politik.

Pembahasan

Pendidikan politik merupakan upaya dalam meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik siswa khususnya kaum milenial karena latar belakang politiknya, hal ini akan memberikan motivasi aktif dalam hubungan antarmanusia, bergabung dengan organisasi siswa, berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, dan juga menunjukkan krusialnya warga negara yang aktif dalam kehidupan politik, partisipasi dalam pemilu.. Kesadaran politik di SMA Swasta Cahaya Medan mendapatkan nilai kurang bagus tampak saat tes awal masih banyak siswa yang belum memahami bagaimana cara memakai hak pilih mereka. Hasil survei menunjukkan SMA Swasta Cahaya Medan saat ini berada di tengah situasi tersebut dengan mempromosikan pendidikan politik dengan tujuan membangun masa depan, mengembangkan serta meningkatkan partisipasi politik dan kesadaran masyarakat kaum milenial dalam pemilu serentak 2024. Tempat pelaksanaan yang paling baik antara lain fasilitas berupa laboratorium komputer dan perpustakaan sekolah yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang pendidikan politik siswa. Selain itu, pendidikan politik sederhana bagi pelajar akan memberikan pengalaman tersendiri bagi siswa untuk kedepannya dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini dapat digunakan sebagai insentif untuk memberikan pendidikan politik pada kaum milenial. Selain hal baik, ada juga kendalanya dalam pelaksanaan pendidikan politik di SMA Swasta Cahaya Medan. Kendala pertama adalah situasi politik yang buruk di Indonesia. Sekolah ini mengajarkan teori dan filsafat politik keahlian khusus, jika melihat realitas situasi politik di Indonesia, itu tidak mendukung keterampilan ini secara umum. Sehingga tidak ada

ketertautan yang begitu penting. Situasi politik di Indonesia masih banyak yang menyalahgunakan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Sehingga pendidikan politik menjadi krusial dalam meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik bagi kaum milenial dalam menyukkseskan pemilu serentak 2024.

Kesimpulan

Secara umum, penelitian ini bermaksud untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran kaum milenial akan pendidikan politik dalam menyongsong dan menyukkseskan pemilu serentak 2024. Dari hasil penelitian dikonklusikan banyak kaum milenial yang tidak memahami krusialnya tentang berpartisipasi dalam politik dan tidak terlalu mengetahui proses pemilu serentak 2024. Sehingga kajian ini akan berguna dalam membantu menyediakan, memahami, dan mengajak kaum milenial untuk datang pergi ke tempat pemungutan suara untuk memberikan suaranya dan tampak bahwa hasil dari kajian ini juga siswa begitu antusias sehingga diharapkan tingkat partisipasi dan kesadaran politik semakin meningkat akan meningkat.

Referensi

- Adam, A. F., Enala, S. H., Kontu, F., & Prasetya, M. N. (2023). Sosialisasi dan Pelatihan Peningkatan Partisipasi Politik dan Kebijakan Publik. *ABDIMASKU: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 6(1), 165-172.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980.
- Akmaluddin, A., & Wempie, M. A. R. (2022). BUDAYA POLITIK PEMILIH MILENIAL DALAM PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 49-57.
- Averus, A., & Alfina, D. (2020). Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 585-610.
- Fauzi, H. (2023). Budaya Politik Pemilih Milenial (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020). *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 3(1), 89-94.
- Hasibuan, R. S., Syuhanda, A., Fachrurrozy, M., Efendi, S., & Idris, F. (2022). Wawasan Kebangsaan untuk Kaum Milenial. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 10823-10828.
- Kadir, N. (2022). Media Sosial dan Politik Partisipatif: Suatu Kajian Ruang Publik, Demokrasi Bagi Kaum Milenial dan Gen Z. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 4(2), 180-197.
- Niode, B., & Lengkong, J. P. (2023). Peran Media Sosial dalam Partisipasi Politik Kaum Milenial: Studi Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 di Kecamatan, Langowan Selatan. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 12(2), 153-162.
- Polii, E. Z. F., Pati, A. B., & Potabuga, J. (2020). Pengaruh Media Sosial Terhadap Partisipasi Politik Kaum Milenial Dalam Pemilihan Umum di Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 9(3).
- Pratama, D., Widodo, T., & Maulia, S. T. (2023). Penggunaan Media Digital dan Partisipasi Politik Milenial. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2), 79-89.
- Rahman, A., & Suharno, S. (2020). Pelaksanaan Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 282-290.

- Yusrin, Y., & Salpina, S. (2023). Partisipasi Generasi Millennial dalam Mengawasi Tahapan Pemilu 2024. *Journal on Education*, 5(3), 9646-9653.
- Zulfa, A. N., Sari, E. P. P., & Trisiana, A. (2019). Meningkatkan Kesadaran Politik di Kalangan Anak Muda. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(1).
- Zulkarnaen, F., Adara, A. S., Rahmawati, A., Wartadiayu, L., & Pamungkas, M. D. (2020). Partisipasi politik pemilih milenial pada pemilu di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 5(2), 55-63.